



Jangan Coba-coba Nuthuk Harga

PKL Kuliner Malioboro Komitmen Jaga Citra Wisata Yogya

CITRA pariwisata Kota Yogyakarta kembali diuji pada musim libur panjang akhir tahun ini. Karenanya, semua pelaku wisata diminta memberikan pelayanan terbaik. Salah satunya tidak *nuthuk* atau aji mumpung menaikkan harga secara tidak wajar. Pedagang yang ngeyel terancam *blacklist*, tidak boleh berjualan lagi di Yogya.

Komitmen ini disambut pedagang kaki lima (PKL) Malioboro. "Kami angkriangan Malioboro bersama PKL lainnya berkomitmen tidak *nuthuk* harga. Artinya harga standar," kata Ketua Paguyuban Angkriangan Malioboro, Dimanto kepada Merapi belum lama ini.

Dimanto menjelaskan, yang dimaksud harga standar adalah harga yang diterapkan pada angkriangan umumnya. Misalnya teh panas dihargai Rp 3.000 bagi pelanggan dan harga maksimal minuman Rp 5.000 untuk tamu dari luar kota. Alasannya un-

tuk harga Rp 5.000 karena menggunakan gelas cup plastik. Harga itu sudah kesepakatan para pedagang di paguyuban.

"Selama ini, belum ada angkriangan di Malioboro yang *nuthuk*," ujarnya.

Dia menyatakan para komunitas pedagang kuliner Malioboro juga melakukan pengawasan ke para pedagang. Jika ada pedagang yang melanggar, maka ada sanksi dari paguyuban. Total ada 28 pedagang angkriangan yang beroperasi di pedestrian sisi timur Malioboro pada siang hari.

"Kalau langgar sekali diingatkan. Tiga kali melanggar, tidak boleh jualan selama liburan. Melanggar lagi, diusulkan izin dicabut ke UPT Malioboro," imbuh Dimanto.

** Bersambung ke halaman 9*

LAPORAN KHUSUS

SIAP GEBUK PKL NUTHUK

- Wakil Walikota Yogyakarta mengancam akan memasukkan PKL kuliner dalam daftar hitam jika nekat *nuthuk* harga kepada pembeli. PKL yang membandel tidak diperbolehkan lagi berjualan di lokasi strategis, misalnya Malioboro.
- PKL kuliner berkomitmen tidak menaikkan harga secara tidak wajar kepada wisatawan yang berkunjung di Yogya. Paguyuban PKL juga menerapkan teguran dan sanksi bagi anggotanya yang nakal.
- PKL wajib memasang papan harga menu makanan dan minuman. Pembeli diharapkan jangan malu bertanya harga sebelum beli makan.
- UPT Malioboro menyiapkan Satgas Harga untuk mengawasi serta menindaklanjuti laporan wisatawan yang dirugikan PKL kuliner. Sejauh ini baru satu PKL kuliner yang dicabut ijinnya karena *nuthuk* harga beberapa waktu silam.



Tindak Lanjut

- Untuk Ditanggapi
- Untuk Diketahui
- Jumpa Pers
- ela

Untuk kebersihan Malioboro di-akuinya ada pembersihan dan pengambilan sampah secara rutin sehari tiga kali. Namun saat libur akhir tahun menurutnya jumlah petugas kebersihan masih kurang. Oleh sebab itu pada PKL di Malioboro sepakat juga menambah tenaga kebersihan.

"PKL Malioboro sepakat tambah tenaga kebersihan dan sewa armada. Itu pakai biaya sendiri para PKL. Tiap hari PKL juga bersih-bersih di lapaknya sendiri," paparnya.

Satgas Harga

Secara terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro Kota Yogyakarta Ekwanto mengakui dulu pernah ada satu PKL Malioboro yang *nuthuk*, tapi dua tahun terakhir tidak ada pedagang yang *nuthuk*.

PKL itu, lanjutnya, sudah diberi sanksi dengan dicabut izin berjualannya di Malioboro.

lannya di Malioboro.

"Hanya satu PKL dan sekarang sudah tidak ada lagi. Kalau sampai terbukti *nuthuk* kami serahkan penyidik Satpol PP PPNS bisa kena tindakan final sampai pencabutan izin. Jadi jangan coba-coba untuk *nuthuk* harga karena pemerintah akan tegas," terang Ekwanto.

Dia menuturkan, untuk menghadapi libur Natal 2019 dan Tahun Baru 2020 pihaknya mengerahkan petugas Jogoboro guna melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada para ketua komunitas PKL di Malioboro. Selain itu juga menerjunkan Satgas Harga yang melibatkan Satpol PP Penyidik PNS untuk memantau PKL kuliner dan lesehan terkait harga.

"Termasuk melakukan penertiban, eksekusi atau pelanggaran oleh pelaku

wisata atau PKL yang melanggar," tambahnya.

Dia mengutarakan, jika ada wisatawan atau pengunjung Malioboro yang dirugikan atau kena *nuthuk* bisa lapor atau mengadu ke Kantor UPT Malioboro. Menurutnya, ada sekitar 2.300 pedagang PKL di Malioboro.

Di sisi lain, Wakil Walikota Yogyakarta Heroe Poerwadi berharap pada libur Natal dan Tahun baru nanti tidak ada keluhan atau komplain dari wisatawan terkait pelayanan wisata di Kota Yogyakarta. Misalnya tarif parkir, menaikkan harga sembarangan atau *nuthuk*. "Tidak boleh lagi ada komplain dari wisatawan," kata Heroe.

Dia mengatakan akan menindak tegas pelaku wisata yang tidak memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan. Salah satunya mema-

sukkan pelaku wisata tersebut ke daftar hitam. Baik dari lokasi berjualan maupun mengurus perizinan tidak diperbolehkan.

"Akan kami *black list*. Misalnya jika ada pedagang *nuthuk*, tempat jualannya akan ditutup. Tidak boleh lagi berjualan di Yogyakarta atau mengurus perizinan tidak lagi diperbolehkan," tegasnya.

Menurutnya semua pelaku wisata harus memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan yang datang karena bisa mempengaruhi citra seluruh wisata di Yogya.

Pelayanan yang buruk akan berdampak pada wisata Kota Yogya ke depan. Sebaliknya pelayanan baik dan berkesan akan mendatangkan kembali wisatawan ke Yogyakarta.

(Tri/C-4/Son) - a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Malioboro	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005